

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi daripada peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tersebut pemerintah cenderung mengatur pelaksanaan pembangunan dengan mendorong masyarakat tani untuk ikut serta dalam pembangunan melalui rekayasa sosial atau dipaksa untuk berperan serta sebagai objek pembangunan (Padmanagara, 1996 *dalam* Anantanyu, 2011). Kebijakan pembangunan sektor pertanian pada dasarnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diimplementasikan pada suatu program yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan berperan penting dalam merencanakan strategi yang tepat guna menjamin berhasilnya program.

Menurut Kumba (2003) salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu program ialah dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat secara langsung. Pembangunan pertanian yang bersifat top-down yang hanya memberikan input produksi akan menyebabkan petani memiliki ketergantungan terhadap pemerintah dan menjadikan petani semakin lemah (Dayat, 2017). Oleh karena itu keterlibatan petani terhadap program merupakan hal penting agar pencapaian program tidak bersifat sementara. Menurut Uphoff (1988) *dalam* Triguna (2021) melibatkan masyarakat dalam suatu pembangunan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program. Dengan adanya partisipasi akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang terbatas. Selain itu menurut Syahyuti (2006) partisipasi masyarakat dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.

Berbagai program pada sektor pertanian dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya yaitu program Sekolah Lapang. Program tersebut diatur melalui peraturan Menteri Pertanian No 50/Permentan/OT.140/5/2013 tentang pedoman Sekolah Lapang pertanian. Sekolah Lapang merupakan program pemerintah dengan

pendekatan bottom up, yang menuntut peran petani sebagai pelaku, peneliti, pemandu dan manajer lahan yang ahli secara aktif untuk berpartisipasi pada keseluruhan kegiatan. Pada kegiatan Sekolah Lapang sawah atau ladang dijadikan tempat belajar bagi petani. Selama pelatihan ini penyuluh hanya bertindak sebagai fasilitator dari keseluruhan proses belajar bukan sebagai guru (Zikri, 2020).

Kegiatan Sekolah Lapang diharapkan petani lebih berdaya dan mampu mengatasi permasalahan nya sendiri, terutama dalam pengetahuan dan keterampilan petani. Sekolah Lapang diharapkan mampu mengubah petani dari berbudaya pasif tidak berdaya menjadi berdaya aktif, kreatif, inovatif, dan berwawasan ilmiah (Anonim, 2016). Sekolah Lapang dikatakan berhasil apabila tujuan dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dapat tercapai. Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan tersebut maka perlu dilakukan peninjauan, peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Sekolah Lapang.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan Sekolah Lapang adalah partisipasi dari petani yang mengikuti kegiatan Sekolah Lapang tersebut. Tanpa adanya partisipasi petani maka Sekolah Lapang tidak akan berhasil karena petani merupakan pelaku utama dalam program pembangunan pertanian. Partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan petani lebih ditekankan agar petani merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu aktif dalam kegiatan Sekolah Lapang mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi (Wibowo, 2011).

Penelitian dari beberapa ahli menyatakan bahwa partisipasi petani dalam pelaksanaan Sekolah Lapang masih belum sempurna atau bisa dikatakan masih rendah. Sebagai contoh, Halid (2013) menemukan bahwa pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Desa Ilongga Kecamatan Tabong Kabupaten Gorontalo telah berhasil, namun petani belum mampu secara maksimal menerapkan semua komponen PHT yang diajarkan dalam SL-PHT. SL-PHT merupakan salah satu program dalam Sekolah Lapang yang bersifat partisipatif. Masalah ini menyebabkan pelaksanaan Sekolah Lapang yang dilaksanakan sudah tidak sama lagi dengan Sekolah Lapang yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan tujuan mulia dari pelaksanaan

penyuluhan melalui Sekolah Lapang yaitu mengajak petani untuk belajar langsung di lahan usaha taninya, mengamati masalah dan penyebabnya, serta menganalisis perkembangan.

Partisipasi petani terhadap suatu program pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Ginting (2000) partisipasi petani pada suatu program dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam dirinya (internal) maupun faktor yang berasal dari luar dirinya (eksternal). Adawiyah *et al.* (2017) mengemukakan bahwa karakteristik petani seperti usia, pendidikan nonformal, pendidikan formal, dan tingkat kosmopolitan berpengaruh terhadap partisipasi pada kegiatan Sekolah Lapang. Selain itu menurut Slamet (2003) bahwa paling tidak terdapat tiga syarat yang mempengaruhi partisipasi yaitu adanya kesempatan dalam pembangunan, adanya kemampuan dan adanya motivasi untuk berpartisipasi. Suprayitno (2010) dalam Triguna (2021) mengemukakan bahwa partisipasi dalam pelaksanaannya memerlukan kemampuan yang memadai dan partisipasi akan berjalan apabila tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk meraihnya. Sebagaimana dikemukakan Mulyandari *et al* (2010) bahwa keputusan petani untuk menolak suatu inovasi dikarenakan rendahnya tingkat kemampuan petani dalam membuka diri terhadap suatu informasi baru.

Merujuk pada permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mendalam terkait partisipasi petani dalam Sekolah Lapang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam kegiatan Sekolah Lapang.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Sijunjung merupakan daerah sentral pertanian di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung juga telah melaksanakan Sekolah Lapang mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Kabupaten Sijunjung memiliki 8 Kecamatan, dengan 8 BPP, yang mana seluruh Kecamatan di Kabupaten Sijunjung sudah mengikuti kegiatan Sekolah Lapang.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung telah melakukan kegiatan Sekolah Lapang mulai dari tahun 2010. Dari data sekunder yang didapat, terdapat pelaksanaan Sekolah Lapang di 8 BPP di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2016 – 2021 yaitu BPP Sumpur Kudus 6 SL, BPP

Koto VII 8 SL, BPP Kupitan 6 SL, BPP IV Nagari 7 SL, BPP Sijunjung 3 SL, BPP Lubuk Tarok 13 SL, BPP Tanjung Gadang 10 SL, BPP Kamang Baru 6 SL, (*Lampiran 1*).

Pada tinjauan dan diskusi awal yang dilakukan kepada beberapa penyuluh, didapatkan informasi bahwa petani peserta Sekolah Lapang pada tahun 2019 tidak seluruhnya mengikuti Sekolah Lapang secara sepenuhnya (*Lampiran 2*). Padahal, setiap pertemuan secara berurutan secara sepenuhnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, sehingga bila petani tidak mengikuti satu kali pertemuan maka tujuan dari Sekolah Lapang tidak akan tercapai. Menurut penyuluh alasan petani tidak mengikuti kegiatan Sekolah Lapang secara berkelanjutan salah satunya adalah kesempatan. Menurut Slamet (2003) kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat akan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam suatu program. Petani peserta lebih memprioritaskan kegiatan pribadinya di lahan sawah masing-masing dibandingkan mengikuti kegiatan Sekolah Lapang. Sehingga kesempatan mereka untuk menghadiri Sekolah Lapang terabaikan. Kemudian permasalahannya lain tidak sesuai dukungan pemerintah dengan kondisi daerah mereka. Seperti pengadaan saprodi benih padi yang diberikan pemerintah tidak cocok ditanam di daerah mereka, sehingga mengakibatkan mereka malas untuk mengikuti kegiatan Sekolah Lapang.

Belum maksimalnya partisipasi petani dalam program Sekolah Lapang menjadi satu masalah yang perlu dipetakan dan kemudian dicarikan rekomendasi terbaik agar upaya pembangunan pertanian di Kabupaten Sijunjung lebih efektif dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana partisipasi petani dalam program kegiatan Sekolah Lapang di Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana partisipasi petani dalam pelaksanaan Sekolah Lapang di Kabupaten Sijunjung?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam Sekolah Lapang di Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan

Dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa partisipasi petani dalam pelaksanaan Sekolah Lapang di Kabupaten Sijunjung.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam Sekolah Lapang di Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi akademisi, penelitian merupakan sebuah tambahan ilmu pengetahuandalam pengembangan ilmu penyuluhan dan pembangunan.
2. Bagi pemerintah, khususnya Kabupaten Sijunjung penelitian menjadi tolakukur dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan denganpartisipasi petani dalam Sekolah Lapang di Kabupaten Sijunjung.
3. Bagi penyuluh pertanian di Kabupaten Sijunjung, penelitian ini diharapkanmampu menjadi pedoman dalam peningkatan kompetensi dan memberi dampak positif terhadap penyuluh pertanian.

Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media untukmenambah wawasan petani dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Lap

